



POLICY BRIEF

SUBSIDI KOMODITAS PANGAN
UNTUK PENGENDALIAN INFLASI
DAN PERLINDUNGAN DAYA BELI
MASYARAKAT DI KABUPATEN
MUARA ENIMIM
SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN



TIM PERUMUS DAN EVALUASI
KEBIJAKAN RISET DAERAH
KABUPATEN MUARAENIM

Daftar Isi

A. Pesan Kunci	3
B. Pendahuluan	3
C. Respon Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam Pengendalian Harga Bahan Pokok	5
D. Overview Kebijakan Subsidi di Berbagai Negara	11
E. Efektifitas Subsidi	12
F. Kriteria Penerima Manfaat.....	15
G. Risiko dan Kebijakan Mitigasi	15
H. Monitoring dan Evaluasi Program.....	16
I. Keberlanjutan Program Subsidi dalam Mendukung Ketahanan Pangan.....	17
J. Rekomendasi Utama	18
K. Rekomendasi Tambahan	18
Referensi	19

**SUBSIDI KOMODITAS PANGAN UNTUK PENGENDALIAN INFLASI DAN
PERLINDUNGAN DAYA BELI MASYARAKAT DI KABUPATEN MUARA ENIM,
SUMATERA SELATAN**

A. Pesan Kunci

- Subsidi pangan strategis adalah instrumen utama pengendalian inflasi daerah, khususnya untuk komoditas beras, telur ayam ras, dan cabai yang menjadi penyumbang terbesar IHK di Kabupaten Muara Enim.
- Besaran subsidi beras premium (Rp 3.000/kg), telur ayam ras (Rp 5.000/kg), Ikan konsumsi (Rp 10.000/kg) dan kopi (Rp 20.000/kg) dinilai proporsional–moderat, efektif menjaga daya beli masyarakat tanpa menimbulkan distorsi harga.
- Subsidi minyak goreng kemasan (Rp 6.000/liter), cabai merah dan cabai rawit (Rp 20.000/kg) relatif tinggi, serta gula pasir (Rp 6.000/kg) juga berada di atas kisaran moderat; keduanya perlu disesuaikan ke 20–25% dari HET/HAP agar efektif menekan inflasi tanpa mengganggu mekanisme pasar
- Intervensi harga perlu diintegrasikan dengan penguatan pasokan dan distribusi, sehingga kebijakan subsidi tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi mendukung stabilitas harga berkelanjutan.
- Kebijakan Pemkab selaras dengan praktik internasional, di mana subsidi efektif jika bersifat targeted, moderat, dan dikombinasikan dengan manajemen cadangan pangan untuk melindungi daya beli masyarakat.

B. Pendahuluan

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjamin harga komoditas bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat miskin. Aturan ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Keputusan Presiden No. 23 Tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Daerah. Dengan hadirnya aturan hukum tersebut, maka

pemerintah memiliki tindakan legal untuk memitigasi masalah utama dalam komoditas bahan pokok, yaitu kenaikan harga yang berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.

Harga komoditas pangan pokok di Indonesia sendiri menunjukkan tren kenaikan signifikan antara Januari 2018 hingga Mei 2024, mencerminkan dinamika pasar dan tekanan ekonomi yang terus berkembang. Seperti contoh, komoditas berupa daging ayam naik menjadi 24,76%, minyak goreng naik menjadi 38,41%, telur ayam naik menjadi 29,38%, dan beras naik menjadi 26,45% dalam periode tersebut, dengan lonjakan Year-over-Year tertinggi pada beras mencapai 15,50% di 2024 (Jamilatuzzahro & Suditomo, 2024). Fluktuasi ini dipengaruhi kombinasi faktor seperti meningkatnya biaya produksi, ketidakstabilan pasokan, serta tingginya permintaan musiman, sehingga menegaskan perlunya intervensi pemerintah melalui kebijakan stabilisasi harga untuk menjaga keterjangkauan komoditas pokok dan melindungi daya beli masyarakat.

Tren kenaikan harga komoditas bahan pokok ini berdampak pada peningkatan inflasi di daerah. Peningkatan harga bahan pokok memiliki korelasi langsung dengan inflasi di daerah karena komoditas pangan seperti beras, telur ayam, daging ayam, dan minyak goreng memiliki bobot besar dalam perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Tjahjono et al., 2003). Ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan signifikan, terutama pada komoditas dengan konsumsi harian tinggi, dampaknya langsung terlihat pada kenaikan *volatile food inflation* (Bhattacharya & Jain, 2020; Iddrisu & Alagidede, 2020). Di tingkat daerah, lonjakan harga ini tidak hanya memengaruhi angka inflasi bulanan, tetapi juga menekan daya beli rumah tangga, khususnya kelompok miskin yang sebagian besar pendapatannya dialokasikan untuk kebutuhan pangan.

Selain itu, kenaikan harga bahan pokok sering memicu efek psikologis di pasar yang dapat memperluas tekanan inflasi ke komoditas lain. Ketika harga beras atau telur naik, ekspektasi inflasi masyarakat dan pedagang juga meningkat, sehingga harga barang non-pangan ikut terdorong naik. Hal ini menjadikan pengendalian harga bahan pokok strategis bukan hanya untuk menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi makro daerah agar inflasi tidak melebar ke sektor-sektor lain (Pinstrup-Andersen, 2015).

Selain inflasi, masalah lain yang menjadi catatan dalam dinamika harga bahan pokok yaitu tingkat daya beli masyarakat, terutama pada kelompok berpendapatan rendah. Komoditas

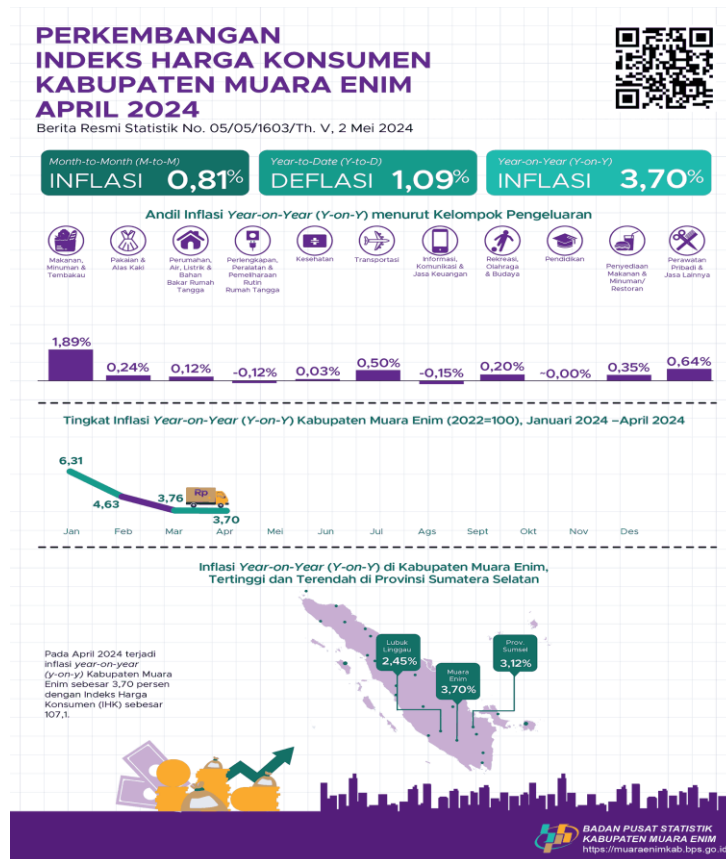
bahan pokok termasuk kebutuhan dasar yang menghabiskan porsi besar pengeluaran rumah tangga. Ketika harga bahan pokok naik, proporsi penghasilan yang harus dialokasikan untuk konsumsi pangan semakin besar sehingga menyisakan ruang yang lebih kecil untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Tabungan (Pella, 2024).

Dampak ini paling dirasakan oleh rumah tangga miskin dan rentan karena elastisitas pengeluaran mereka terhadap harga pangan sangat tinggi. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok dapat menurunkan konsumsi kuantitas maupun kualitas pangan masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan pengeluaran, rumah tangga cenderung mengurangi pembelian atau beralih ke bahan pangan dengan kualitas lebih rendah. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya memengaruhi daya beli tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

C. Respon Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam Pengendalian Harga Bahan Pokok

Pengendalian kebijakan inflasi di Kabupaten Muara Enim menjadi prioritas mengingat komoditas pangan seperti beras, telur ayam ras, dan cabai merupakan penyumbang utama fluktuasi Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan harga pada komoditas tersebut berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya rumah tangga miskin yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk kebutuhan pangan.

Data BPS Kabupaten Muara Enim April 2024 menunjukkan tingkat inflasi *year-on-year* (Y-on-Y) sebesar 3,70% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,1. Kontributor utama inflasi adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,89%, diikuti transportasi 0,50% dan perawatan pribadi 0,64%. Hal ini menandakan tekanan terbesar berasal dari kenaikan harga pangan, yang umum terjadi akibat fluktuasi pasokan komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam. Tren Y-on-Y dari Januari hingga April menunjukkan penurunan dari 6,31% pada Januari ke 3,70% pada April, mengindikasikan adanya upaya stabilisasi harga meski tekanan inflasi pangan masih tinggi.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Muara Enim, 2024.

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim (2024)

Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Selatan, angka inflasi Kabupaten Muara Enim (3,70%) lebih tinggi dari rata-rata provinsi (3,12%) dan Lubuk Linggau (2,45%). Perbedaan ini menyoroti perlunya intervensi lebih kuat di sektor pangan untuk mengendalikan *volatile food inflation*. Data ini mengonfirmasi pentingnya kebijakan operasi pasar dan subsidi bahan pokok, karena kelompok makanan menyumbang hampir setengah dari total inflasi daerah.

Sebagai respon terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menetapkan kebijakan subsidi melalui program Gerakan Pangan Murah yang difokuskan pada komoditas strategis. Program ini menyalurkan subsidi dengan besaran berbeda untuk beras premium, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, ikan konsumsi, dan kopi guna menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan bahan pokok bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Intervensi ini juga dirancang untuk meredam *volatile food inflation* yang kerap meningkat menjelang periode tertentu seperti bulan Ramadan atau saat pasokan terganggu.

Kebijakan subsidi ini memiliki relevansi strategis karena tidak hanya menyentuh aspek perlindungan sosial, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah. Dengan menjaga harga pangan tetap terkendali, Pemkab Muara Enim berupaya mencegah lonjakan inflasi yang dapat berdampak luas pada sektor lain, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah sesuai dengan arahan kebijakan nasional.

Tabel 1. Daftar Komoditas, Harga Eceran Tertinggi, Harga Acuan Penjualan, dan Rencana Jumlah Subsidi

KOMODITAS	JUMLAH (KG)	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) /HARGA ACUAN PENJUALAN (HAP)	SUMBER DATA	SUBSIDI (Rp)*
Beras premium	108.000	Rp. 14.900 (HET Premium)	Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2024	Rp. 3000
Cabe rawit merah	1.200	Rp. 40.000 - Rp 57.000 (HAP)	Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024	Rp. 20.000
Cabe merah (keriting/besar_	1.200	Rp. 37.000- Rp. 57.000 (HAP)	Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024	Rp. 20.000
Telur ayam ras	7.200	Rp 30.000 (HAP)	Panel Harga Pangan	Rp. 5000
Ikan konsumsi	9.000	Ikan kembung: Rp. 41.320 (HAP)	Panel Harga Pangan	Rp. 10.000
		Ikan tongkol: Rp 34.465 (HAP)		
		Ikan bandeng: Rp 33.7393 (HAP)		
Kopi	3.000	Rp. 100.000/kg (harga biji kopi di konsumen)	Harga Pasar Biji Kopi Hijau Indonesia 2025 - Kopi Spesial Indonesia	Rp. 20.000

\Minyak Goreng Kemasan	5.675	Rp. 20.000/liter (HET)	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) , dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) Minyak Goreng - JDIH Kementerian Perdagangan RI	Rp.6.000
Gula Pasir	5.675	Rp. 17.500/kg (HAP)	Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2024	Rp.6.000

Sumber: *) Keputusan Bupati Muara Enim No. 159 /KTPS/DKP/2025

Subsidi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim pada operasi pasar menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga pangan, khususnya komoditas strategis yang berkontribusi besar terhadap inflasi. Pada beras premium, subsidi sebesar Rp 3.000 per kilogram atau sekitar 20% dari harga eceran tertinggi (HET) dinilai cukup ideal. Besaran ini berada dalam rentang efektif 15–25% yang lazim digunakan untuk menahan laju *volatile food inflation*, mengingat beras memiliki bobot terbesar dalam Indeks Harga Konsumen (IHK) (Kemenkeu.go.id, 2024). Beberapa pemda mengambil tindakan serupa. Seperti contoh, pada tahun 2024, Pemkot Bima memberikan subsidi Rp 3.000 per kilogram

beras bertujuan menekan lonjakan harga yang sempat mencapai Rp 16.000/kg di pasar lokal (Kompas.com, 2024). Dengan intervensi ini, harga jual beras dapat turun menjadi sekitar Rp 12.000/kg, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kenaikan harga bahan pokok.

Sementara itu, subsidi telur ayam ras sebesar Rp 5.000 per kilogram atau 16% dari harga acuan penjualan (HAP) juga termasuk proporsional. Komoditas ini berada pada kelompok *core inflation* sehingga intervensi moderat melalui subsidi mampu menjaga daya beli tanpa menimbulkan distorsi harga (Tjahyono et al., 2000). Sebagai contoh di Indonesia, ketika pemerintah daerah memberikan subsidi Rp 5.000/kg pada operasi pasar telur ayam ras, harga eceran bisa turun dari HAP sekitar Rp 27.631/kg menjadi Rp 22.000–23.000/kg. Penurunan moderat ini membuat telur tetap terjangkau bagi konsumen sehingga daya beli masyarakat terjaga, namun tetap memberi ruang bagi pedagang dan produsen untuk menutupi biaya produksi. Dengan kata lain, intervensi ini tidak menimbulkan distorsi harga yang biasanya terjadi jika subsidi terlalu besar, seperti merugikan produsen atau menciptakan perbedaan harga ekstrem di pasar.

Berbeda dengan dua komoditas tersebut, subsidi untuk cabai merah dan cabai rawit merah tergolong besar. Dengan besaran Rp 20.000 per kilogram, nilainya mencapai 35–54% dari HAP untuk cabai merah dan hamper 30-50% untuk cabai rawit. Kebijakan ini memang efektif meredam gejolak harga cabai yang terkenal fluktuatif, terutama pada periode permintaan tinggi seperti hari besar keagamaan. Namun, subsidi dengan persentase setinggi ini berpotensi menekan mekanisme pasar jika dilakukan secara berkelanjutan. Untuk jangka panjang, idealnya intervensi harga cabai dilakukan melalui penguatan distribusi dan pengelolaan pasokan, sehingga subsidi dapat diturunkan ke kisaran 20–25% tanpa mengurangi efek pengendalian inflasi.

Pada komoditas protein hewani lain seperti ikan konsumsi, subsidi Rp 10.000 per kilogram atau 24–29% dari HAP memberikan dampak langsung pada penurunan harga di pasar tradisional. Namun, angka ini juga relatif tinggi dan perlu disesuaikan agar tidak mengganggu keseimbangan harga di tingkat nelayan. Sementara itu, subsidi untuk kopi sebesar 20% dari harga konsumen terlihat cukup besar mengingat komoditas ini bukan penyumbang utama inflasi pangan. Intervensi kopi lebih tepat diarahkan pada sektor hilir, seperti dukungan bagi UMKM berbasis kopi, dibandingkan menurunkan harga bahan baku secara langsung.

Subsidi minyak goreng kemasan sebesar Rp 6.000/liter atau sekitar 30% dari HET (Rp 17.500/liter) pada dasarnya menunjukkan intervensi harga yang relatif besar dari pemerintah. Tujuannya adalah menstabilkan harga di tingkat konsumen dengan cara meredam transmisi kenaikan harga CPO global ke pasar domestik. Kebijakan ini efektif menjaga daya beli masyarakat karena harga tetap terjangkau, tetapi menyebabkan penurunan ruang margin bagi pelaku usaha. Akan tetapi, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya subsidi, melainkan juga oleh faktor pendukung lain seperti ketersediaan stok, mekanisme penyaluran, dan kelancaran distribusi di berbagai wilayah.

Sedangkan untuk gula pasir, subsidi Rp 6.000/kg atau setara 34,29% dari HAP (Rp 17.8500/kg) tergolong tinggi. Mengingat gula pasir bukan komoditas dengan volatilitas ekstrem, intervensi sebesar ini berpotensi menimbulkan distorsi harga jika dijalankan terus-menerus. Untuk jangka panjang, subsidi gula idealnya diturunkan ke kisaran 20–25% sambil memperbaiki rantai pasok agar stabilitas harga dapat tercapai secara berkelanjutan.

Secara umum, analisis ini menyimpulkan bahwa subsidi pada komoditas pangan strategis memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan menghindari lonjakan inflasi, khususnya pada *volatile food inflation*. Menurut Tjahjono et al. (2000), komoditas pangan seperti beras, telur, dan cabai termasuk kelompok barang yang sangat dipengaruhi oleh guncangan pasokan (*supply shock*) sehingga dapat menciptakan fluktuasi harga jangka pendek yang tidak mencerminkan tekanan inflasi inti. Intervensi pemerintah melalui subsidi membantu menahan dampak *noise inflation* ini agar tidak memengaruhi ekspektasi inflasi masyarakat secara luas. Dengan menjaga harga komoditas pangan tetap stabil, subsidi mampu meredam transmisi inflasi musiman ke dalam IHK dan mencegah pergeseran ke inflasi inti yang lebih sulit dikendalikan dengan kebijakan moneter (Tjahjono et al., 2000).

Lebih jauh, subsidi yang diberikan secara tepat sasaran dapat mengurangi volatilitas harga tanpa menciptakan distorsi besar pada mekanisme pasar. Tjahjono et al. (2000) menekankan bahwa perbedaan antara inflasi inti dan inflasi sesaat harus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan harga. Subsidi pada komoditas dengan kontribusi besar terhadap *headline inflation* seperti beras premium atau telur ayam ras tidak hanya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen stabilisasi makroekonomi. Dengan demikian, penerapan subsidi moderat pada komoditas strategis adalah langkah preventif

untuk memastikan tekanan inflasi jangka pendek tidak berkembang menjadi tekanan inflasi inti yang persisten (Tjahjono et al., 2000).

D. Overview Kebijakan Subsidi di Berbagai Negara

Subsidi bahan pokok merupakan salah satu instrumen kebijakan yang banyak digunakan oleh berbagai negara untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Setiap negara memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan komoditas prioritas, mekanisme distribusi, serta besaran subsidi yang diberikan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan kapasitas fiskalnya. Dengan mempelajari berbagai model subsidi yang diterapkan di negara lain, pemerintah daerah dapat memperoleh perspektif komparatif mengenai praktik terbaik, tantangan, serta faktor keberhasilan kebijakan serupa. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai kebijakan subsidi bahan pokok di beberapa negara sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan lokal dan mengidentifikasi ruang perbaikan dalam konteks pengendalian inflasi serta perlindungan daya beli masyarakat.

Tabel 2. Overview Kebijakan Subsidi di Berbagai Negara

NO.	NEGARA	KOMODITAS YANG DISUBSIDI	BESARAN SUBSIDI	MEKANISME DISTRIBUSI	DAMPAK TERHADAP INFLASI
1.	Malaysia	Beras (B40 – 40% masyarakat termiskin)	$\pm 15\text{--}20\%$ dari harga pasar	Distribusi langsung melalui pengecer dan program khusus B40	Menekan inflasi pangan tanpa mengganggu mekanisme pasar; tepat sasaran pada kelompok rentan
2.	Thailand	Beras, gula, telur	$\pm 10\text{--}25\%$ dari harga pasar	Subsidi harga ditambah penguatan cadangan pangan pemerintah	Efektif menjaga harga musiman dan meredam <i>volatile food inflation</i>

NO.	NEGARA	KOMODITAS YANG DISUBSIDI	BESARAN SUBSIDI	MEKANISME DISTRIBUSI	DAMPAK TERHADAP INFLASI
3.	India	Beras, tepung, gula (Public Distribution System)	Hingga 50% potongan harga	Sistem kartu distribusi khusus untuk masyarakat miskin	Mengurangi kerentanan pangan, namun membutuhkan anggaran besar
4.	Mesir	Roti (komoditas utama)	Hingga 70% dari harga pasar	Sistem kupon subsidi pangan	Menjaga stabilitas sosial, tetapi menimbulkan ketergantungan dan beban fiskal tinggi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Kebijakan subsidi bahan pokok di berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian harga dan inflasi sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan proporsionalitas besaran subsidi. Malaysia dan Thailand menerapkan subsidi moderat sekitar 15–25% yang fokus pada kelompok rentan serta didukung penguatan cadangan pangan, sehingga mampu menahan inflasi tanpa mengganggu mekanisme pasar. India melalui sistem distribusi publik (PDS) memberikan potongan harga hingga 50% untuk masyarakat miskin, efektif menekan kerentanan pangan namun membutuhkan anggaran besar. Sementara itu, Mesir dengan subsidi roti hingga 70% berhasil menjaga stabilitas harga jangka pendek tetapi menimbulkan ketergantungan dan beban fiskal tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa subsidi paling efektif jika bersifat *targeted*, moderat, dan diintegrasikan dengan pengelolaan pasokan agar mampu menekan inflasi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas pasar

E. Efektifitas Subsidi

Berikut adalah rekomendasi subsidi komoditas beserta analisis:

Tabel 3. Efektifitas Subsidi

NO.	KOMODITAS	KONDISI SUBSIDI SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI KEBIJAKAN
1.	Beras Premium	Rp 3.000/kg ($\pm 20\%$ dari HET)	Proporsional; efektif menahan <i>volatile food inflation</i> karena beras memiliki bobot terbesar di IHK.	Pertahankan besaran subsidi pada kisaran 15–25% HET. Pastikan distribusi tepat sasaran ke rumah tangga miskin untuk menjaga daya beli.
2.	Telur Ayam Ras	Rp 5.000/kg ($\pm 16\%$ dari HAP)	Moderat; menjaga daya beli tanpa menimbulkan distorsi harga. Efektif mengendalikan <i>core inflation</i> .	Pertahankan besaran subsidi pada kisaran 15–20%. Integrasikan dengan monitoring harga produsen untuk menjaga margin peternak.
3.	Cabai Merah	Rp 20.000/kg (35–54% dari HAP)	Terlalu tinggi; efektif meredam lonjakan harga musiman, tetapi berpotensi mengganggu mekanisme pasar jika dilakukan terus-menerus.	Turunkan subsidi ke kisaran 20–25%. Perkuat manajemen pasokan dan distribusi untuk menjaga stabilitas harga jangka panjang.
4.	Cabai Rawit Merah	Rp 20.000/kg ($\pm$ 35–50% dari HAP)	Sama seperti cabai merah; besarnya melebihi proporsi ideal dan berisiko menimbulkan ketergantungan harga pasar.	Sesuaikan subsidi ke 20–25%. Kombinasikan dengan program stabilisasi pasokan (cold storage, distribusi)
5.	Ikan Konsumsi	Rp 10.000/kg (24–29% dari HAP)	Relatif tinggi; membantu menekan inflasi protein hewani tetapi berpotensi mengganggu harga di tingkat nelayan.	Turunkan subsidi ke 15–25%. Lakukan integrasi dengan dukungan logistik perikanan

NO.	KOMODITAS	KONDISI SUBSIDI SAAT INI	ANALISIS	REKOMENDASI KEBIJAKAN
				dan penguatan rantai dingin.
6.	Kopi	Rp 20.000/kg (20% dari harga konsumen)	Moderat; Besar untuk komoditas non-pokok. Dampak pada inflasi kecil; lebih relevan untuk sektor UMKM.	Alihkan subsidi ke sektor hilir (UMKM pengolahan kopi). Jika tetap diberikan di bahan baku, turunkan ke <20%.
7.	Minyak Goreng Kemasan	Rp 6.000/liter (30% dari HET)	Tinggi, efektif meredam fluktuasi harga akibat perubahan harga CPO global, tetapi menekan margin pelaku usaha	Turunkan subsidi di kisaran 20–25%, pastikan ketersediaan stok dan distribusi merata.
8.	Gula Pasir	Rp 6.000/kg (34,29% dari HAP)	Tinggi, mengingat gula pasir bukan komoditas dengan volatilitas ekstrem, berisiko menimbulkan distorsi harga.	Turunkan subsidi ke 20–25% dan perkuat rantai pasok untuk stabilisasi harga jangka panjang.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam hal ini, perhitungan rasio subsidi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Subsidi} = \left(\frac{\text{Jumlah Subsidi per kg}}{\text{HET atau HAP}} \right) \times 100\%$$

Menggunakan rumus tersebut, dapat dilihat indikator dari pemberian subsidi berikut:

Tabel 4. Skenario Efektifitas Subsidi

RASIO SUBSIDI TERHADAP HET/HAP	KATEGORI	PENJELASAN
< 15%	Terlalu kecil	Dampak subsidi kurang signifikan, tidak cukup mendorong daya beli.
15–25%	Moderat/Proporsional	Efektif menjaga keterjangkauan harga dan efisiensi fiskal.
25–35%	Mulai tinggi	Perlu evaluasi dampak fiskal dan potensi distorsi pasar.
> 35%	Terlalu tinggi	Berisiko menimbulkan distorsi harga dan beban fiskal yang besar.

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

F. Kriteria Penerima Manfaat

Mempertimbangkan kenaikan cukup tajam untuk jumlah penerima pada tahun 2025 ke 2-26, disarankan agar penyaluran subsidi sembako murah lebih dikhususkan kepada rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mencakup golongan yang sangat miskin, lansia yang hidup sendiri dan miskin, penyandang disabilitas tanpa pendapatan tetap, serta keluarga dengan balita dan ibu hamil yang rentan terhadap ketahanan pangan. Selain itu, kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung dari kenaikan harga bahan makanan, seperti pekerja sektor informal yang berpenghasilan harian, juga bisa dipertimbangkan sebagai target prioritas tambahan. Menetapkan target berdasarkan data yang diverifikasi oleh perangkat desa/kelurahan akan meningkatkan akurasi program dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran subsidi.

G. Risiko dan Kebijakan Mitigasi

Menerapkan program subsidi sembako murah di Kabupaten Muara Enim membawa berbagai risiko yang harus dikelola agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan tidak

menimbulkan dampak negatif yang bertentangan dengan tujuannya. Pertama, ada potensi risiko penimbunan dan spekulasi pasar, terutama dari distributor atau pengecer nakal yang mengeksploitasi perbedaan harga subsidi. Kedua, ada risiko terkait distribusi yang tidak tepat, seperti penyaluran yang salah, manipulasi data penerima, atau kebocoran saat distribusi di lokasi. Ketiga, ada risiko ketergantungan pada subsidi, di mana masyarakat menjadi terlalu bergantung pada bantuan sehingga menurunkan tingkat kemandirian dan melemahkan pasar lokal. Untuk menangani masalah ini, Pemerintah Kabupaten harus menerapkan sistem pengawasan berbasis digital yang mencakup distribusi kupon berbasis NIK atau QR Code. Selain itu, penting untuk memperkuat kemitraan dengan BUMDes, koperasi, dan ritel resmi dalam proses distribusi. Melibatkan TP-PKK, Babinsa/Bhabinkamtibmas, dan aparat desa juga krusial untuk pengawasan di lapangan.

H. Monitoring dan Evaluasi Program

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program, perlu disusun sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang terintegrasi dan berkelanjutan. Balitbangda bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dapat bertindak sebagai koordinator evaluasi, dengan dukungan Bappeda, Disdag, dan Dinsos. Evaluasi dilakukan secara triwulan dengan melibatkan survei masyarakat dan pemantauan harga di pasar. Beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan meliputi:

- Persentase penurunan harga pangan strategis (beras, telur, cabai)
- Jumlah rumah tangga penerima manfaat (KPM) yang terlayani sesuai target
- Tingkat kepuasan masyarakat penerima subsidi
- Perbandingan inflasi Muara Enim sebelum dan sesudah program
- Efisiensi biaya (biaya per KPM vs. dampak terhadap daya beli)

Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menyesuaikan skala subsidi, memperbaiki mekanisme distribusi, dan sebagai bahan laporan kepada pimpinan daerah serta DPRD.

I. Keberlanjutan Program Subsidi dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Keberlanjutan program subsidi dalam mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan karena kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sistem pangan nasional secara berkesinambungan. Tanpa kesinambungan, manfaat subsidi berisiko hanya bersifat sementara, bahkan dapat menciptakan ketergantungan atau distorsi pasar. Dengan perencanaan berkelanjutan—meliputi analisis dampak sosial-ekonomi, penguatan monitoring, diversifikasi pasokan, edukasi masyarakat, kemitraan multipihak, hingga kajian lingkungan—subsidi dapat diarahkan menjadi investasi jangka panjang yang meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat cadangan pangan lokal, serta membangun ketahanan terhadap gejolak harga maupun krisis global. Pendekatan ini memastikan bahwa ketahanan pangan tidak hanya terjaga saat ini, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di masa depan secara adaptif dan berkeadilan.

1. Analisis Dampak Sosial-Ekonomi:

- 1) Dampak pada petani dan produsen: Subsidi yang terlalu tinggi untuk cabai dan ikan bisa mengurangi insentif produksi. Perlu analisis lebih dalam tentang dampaknya terhadap petani cabai dan nelayan.
- 2) Dampak jangka panjang: Apakah subsidi ini berisiko menciptakan ketergantungan masyarakat atau justru meningkatkan ketahanan pangan?

2. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

- 1) Real-time tracking: Implementasi sistem digital untuk memantau distribusi subsidi dan dampaknya terhadap harga pasar.
- 2) Indikator keberhasilan: Selain inflasi, tambahkan indikator seperti tingkat kepuasan masyarakat, penurunan kemiskinan, atau peningkatan konsumsi pangan bergizi.

3. Strategi Diversifikasi Pasokan:

- 1) Pengembangan lumbung pangan: Membangun cadangan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
- 2) Dukungan untuk pertanian lokal: Subsidi bisa diarahkan untuk meningkatkan produktivitas petani cabai dan nelayan, bukan hanya menurunkan harga konsumen.

4. Edukasi dan Literasi Masyarakat:

- 1) Kampanye diversifikasi pangan: Mengurangi ketergantungan pada beras dengan promosi pangan lokal seperti sagu atau umbi-umbian.
- 2) Pelatihan UMKM: Khusus untuk komoditas kopi, alihkan subsidi ke pelatihan pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah.

5. Kemitraan dengan Swasta dan LSM:

- 1) Kolaborasi dengan swasta: Misalnya, bekerja sama dengan supermarket atau platform e-commerce untuk distribusi subsidi.
- 2) Peran LSM: Melibatkan LSM untuk memastikan subsidi tepat sasaran, terutama untuk kelompok rentan.

6. Kajian Lingkungan:

- 1) Dampak lingkungan dari produksi komoditas subsidi: Misalnya, budidaya cabai yang intensif bisa berdampak pada tanah dan air. Perlu kebijakan pendukung yang berkelanjutan.

7. Skenario Kontinjensi:

- 1) Antisipasi krisis global: Bagaimana kebijakan subsidi akan menyesuaikan jika terjadi gejolak harga global atau bencana alam?
- 2) Cadangan anggaran: Alokasi dana darurat untuk menghadapi lonjakan harga tak terduga.

J. Rekomendasi Utama

- Besaran subsidi beras (Rp 3.000/kg), telur ayam ras (Rp 5.000/kg), dan minyak goreng kemasan (Rp 6.000/liter) dinilai proporsional–moderat, efektif menjaga daya beli masyarakat tanpa menimbulkan distorsi harga.
- Subsidi cabai merah dan cabai rawit (Rp 20.000/kg) relatif tinggi, serta gula pasir (Rp 6.000/kg) juga berada di atas kisaran moderat; keduanya perlu disesuaikan ke 20–30% dari HET/HAP agar efektif menekan inflasi tanpa mengganggu mekanisme pasar

K. Rekomendasi Tambahan

- **Pilot project untuk penyesuaian subsidi:** Uji coba penurunan subsidi cabai secara bertahap sambil memantau dampaknya.

- **Forum multi-stakeholder:** Membentuk tim yang melibatkan petani, pedagang, dan akademisi untuk evaluasi berkala kebijakan subsidi.
- **Penelitian lanjutan:** Studi tentang elastisitas harga komoditas dan perilaku konsumen di Muara Enim untuk mempertajam kebijakan.

Referensi

- Bhattacharya, R., & Jain, R. (2020). Can monetary policy stabilise food inflation? Evidence from advanced and emerging economies. *Economic Modelling*, 89, 122–141. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.10.005>
- Devereux, S. (2016). Social protection for enhanced food security in sub-Saharan Africa. *Food Policy*, 60, 52–62. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.03.009>
- FAS. (2024). *Egypt increases price for subsidized bread for first time in 36 years.* <https://sdgs.un.org/partnerships/ration-system>
- Iddrisu, A. A., & Alagidede, I. P. (2020). Monetary policy and food inflation in South Africa: A quantile regression analysis. *Food Policy*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101816>
- Iemsam-arng, M. (2025). *Grain and Feed Annual, Thailand.*
- Jamilatuzzahro, & Suditomo, R. (2024, June 22). Tren harga pangan di Indonesia: Analisis periode 2018–2024. *EQUITAS FEB UGM Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan.* <https://equitas.feb.ugm.ac.id/2024/06/22/tren-harga-pangan-di-indonesia-analisis-periode-2018-2024/>
- Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 159/KPTS/DKP/2025 tentang Tim Pelaksana Gerakan Pangan Murah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025. (2025).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, Oktober 30). *Badan Pangan Nasional jaga stok pangan, stabilkan harga.* Media Keuangan Kemenkeu. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/badan-pangan-nasional-jaga-stok-pangan-stabilkan-harga>

Kompas.com. (2024, Februari 19). Pemkot Bima subsidi Rp 3.000 per kilogram untuk tekan lonjakan harga beras. *Kompas.com*.

<https://regional.kompas.com/read/2024/02/19/202841878/pemkot-bima-subsidi-rp-3000-per-kilogram-untuk-tekan-lonjakan-harga-beras?page=all>

National Food Security Portal, Government of India. (n.d.). *Public Distribution System (PDS)*.

National Food Security Portal, Government of India. Retrieved August 3, 2025, from https://nfsa.gov.in/portal/PDS_page

Pella, B. J. J. S. (2024). Pengaruh ketahanan pangan terhadap inflasi khususnya produk cabai. *AKUBIS, Jurnal Akutansi dan Bisnis*, 09(01).

Pinstrup-Andersen, P. (2015). *Food price policy in an era of market instability: A political economy analysis* (P. Pinstrup-Andersen, Ed.). Oxford University Press. www.wider.unu.edu

Tjahjono, E. D., Hutabarat, A. R., Haryono, E., Majardi, F., & Pramono, B. (2000). Pengukuran inflasi inti (core inflation) di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 2(4), Article 7. <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i4.280>

Lampiran:

Daftar Komoditas, Harga Eceran Tertinggi, Harga Acuan Penjualan, dan Rencana Jumlah Subsidi:

KOMODITAS	JUMLAH (KG)	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) /HARGA ACUAN PENJUALAN (HAP)	SUMBER DATA	SUBSIDI (Rp)*
Beras premium	108.000	Rp. 14.900 (HET Premium)	Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2024	Rp. 3000
Cabe rawit merah	1.200	Rp. 40.000 - Rp 57.000 (HAP)	Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024	Rp. 20.000
Cabe merah (keriting/besar_	1.200	Rp. 37.000- Rp. 57.000 (HAP)	Peraturan Bapanas No. 12 Tahun 2024	Rp. 20.000
Telur ayam ras	7.200	Rp 30.000 (HAP)	Panel Harga Pangan	Rp. 5000

Ikan konsumsi	9.000	Ikan kembung: Rp. 41.320 (HAP)	Panel Harga Pangan	Rp. 10.000
		Ikan tongkol: Rp 34.465 (HAP)		
		Ikan bandeng: Rp 33.7393 (HAP)		
Kopi	3.000	Rp. 100.000/kg (harga biji kopi di konsumen)	Harga Pasar Biji Kopi Hijau Indonesia 2025 - Kopi Spesial Indonesia	Rp. 20.000
\Minyak Goreng Kemasan	5.675	Rp. 20.000/liter (HET)	Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028 Tahun 2024 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (DOMESTIC MARKET OBLIGATION) , dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (DOMESTIC PRICE OBLIGATION) Minyak Goreng - JDIH Kementerian Perdagangan RI	Rp.6.000
Gula Pasir	5.675	Rp. 17.500/kg (HAP)	Peraturan Bapanas No. 5 Tahun 2024	Rp.6.000



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN**